

Penggunaan Data *Google Trends* Untuk Mengetahui Minat Publik Tentang Sistem Pemilu Proporsional

M. Yusuf Samad ^{1,*}, Taryana Brata ², Denggan Parange Sinurat ², Andi Yakub ¹, Pratama Dahlian Persadha ², Diah Ayu Permatasari ³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Hasanuddin; e-mail: smy23e@student.unhas.ac.id, andyakub@gmail.com

² Program Studi Magister Kajian Intelijen; Sekolah Tinggi Intelijen Negara; e-mail: newerry3199@gmail.com, sinuratdenggan@gmail.com, pratama@cissrec.org

³ Fakultas Ilmu Komunikasi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: pepy@ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: smy23e@student.unhas.ac.id

Submitted: **03/11/2023**; Revised: **10/01/2024**; Accepted: **24/01/2024**; Published: **31/01/2024**

Abstract

A number of polemics ahead of the 2024 elections have begun to emerge, one of which is a polemic regarding the electoral system used in the upcoming 2024 elections, namely a lawsuit against the Election Law regarding the open proportional system on November 14, 2022. However, the lawsuit did not become a public concern until the first hearing was held on November 23, 2022. The lawsuit became a public concern when it entered the beginning of 2023 until mid-2023. This research aims to find out about what events make the trend of public interest increase and the extent of public exploration related to the proportional electoral system. This research method uses a qualitative approach with a case study research type, the research data is obtained through Google Trends which is then analyzed in accordance with the research objectives. The results show that public interest in proportional electoral systems correlates with events related to these systems, such as political parties' attitudes towards closed and open proportional electoral systems. In addition, public interest trends develop specific searches on closed proportional electoral systems and open proportional electoral systems.

Keywords: 2024 Election, Google Trends, Proportional Electoral System, Public Interest

Abstrak

Sejumlah polemik jelang Pemilu 2024 mulai bermunculan, salah satunya adalah polemik mengenai sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024 mendatang, yaitu gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu tentang sistem proporsional terbuka pada 14 November 2022. Hanya saja, gugatan itu belum menjadi perhatian publik hingga sidang perdana digelar pada 23 November 2022. Gugatan itu menjadi perhatian publik ketika memasuki awal tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa saja peristiwa yang membuat tren minat publik mengalami peningkatan dan sejauh mana penelusuran publik terkait sistem pemilu proporsional. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, data penelitian ini diperoleh melalui Google Trends yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat publik terhadap sistem pemilu proporsional berkorelasi dengan peristiwa terkait sistem tersebut, seperti sikap partai politik terhadap sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Selain itu, tren minat publik berkembang penelusuran spesifik pada sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka.

Kata kunci: Pemilu 2024, Google Trends, Sistem Pemilu Proporsional, Minat Publik

1. Pendahuluan

Google Trends telah menjadi sumber data yang sangat populer di kalangan peneliti dari berbagai bidang selama dekade terakhir (Cebrián & Domenech, 2023). Kajian literatur pada 10 tahun pertama penelitian yang menggunakan Google Trends telah mengidentifikasi beberapa aspek utama dalam penelitian akademik, yaitu sistem informasi atau ilmu komputer, kedokteran dan biosains, ekonomi dan bisnis, dan aspek lain seperti keuangan, kebijakan, dan hukum (Jun et al., 2018). Penelitian ini kemudian dikembangkan dengan kajian literatur pada 15 tahun. Hasilnya kajian tersebut mengidentifikasi penulis, negara, sumber, dan dokumen paling signifikan dalam penelitian Google Trends (Madsen et al., 2023). Secara khusus, dalam bidang politik, Google Trends digunakan berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara. Di wilayah Eropa khususnya Jerman, hasil menunjukkan bahwa penggunaan data Google Trends mengindikasikan terdapat korelasi yang kuat antara preferensi pencarian calon pemilih sebelum tanggal pemilihan dengan hasil pemilihan yang sebenarnya. Hal ini juga menunjukkan fakta bahwa preferensi penelusuran dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sosial yang mungkin terjadi bersamaan dengan pemilu (Polykalas et al., 2013).

Di wilayah Amerika, para peneliti telah memperhitungkan empat pemilu terakhir di Amerika Serikat dan lima pemilu terakhir di Kanada, hasilnya menunjukkan bahwa metode ini telah memprediksi pemenang sesungguhnya di semua pemilu yang diselenggarakan sejak 2004 (Prado-Román et al., 2021). Sedangkan di Chili, sebuah studi berhipotesis bahwa Google Trends menghasilkan informasi penting tentang preferensi orang dan tren penelusuran dapat digunakan untuk menghasilkan prakiraan yang efektif tentang pemilihan presiden (Vergara-Perucich, 2022). Selain itu, di wilayah Asia, data Google Trends digunakan pada pemilu Presiden Korea ke-17 hingga ke-19. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemenang dari setiap pemilihan presiden dapat diprediksi (Yoon et al., 2022), sedangkan di wilayah Indonesia, Google Trends disandingkan dengan data *real count* pada pemilihan presiden tahun 2019, hasilnya adalah Google Trends memiliki akurasi dan presisi yang rendah dalam memprediksi pilihan politik pemilih Indonesia berdasarkan data *real count* pemilihan presiden tahun 2019 (Harkan & Eriyanto, 2021). Secara spesifik, Google Trends digunakan untuk penelitian tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hasil menunjukkan bahwa Google Trends tidak mampu memperkirakan keunggulan kandidat di Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah; sedangkan Google Trends mampu memprediksi keunggulan kontestan di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah (Fernardo, 2022).

Penelitian ini fokus pada penggunaan Google Trends menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemilu proporsional. Alasan menggunakan Google Trends adalah akses data pada Google Trends tidak memerlukan keterampilan pemrograman tingkat lanjut atau keahlian ilmu data lainnya, dan data tersebut cenderung mudah diperoleh untuk semua orang yang memiliki akses internet dan komputer atau sejenisnya (Walker, 2019). Selain itu, alasan memilih fokus penelitian ini karena adanya propaganda tentang isu sistem pemilu proporsional (Samad et al., 2023). Google Trends

melaporkan unit indeks volume pencarian atau *Search Volume Index* (SVI) untuk mengukur tren pencarian dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Unit ini menunjukkan minat penelusuran relatif terhadap titik tertinggi pada bagan untuk kawasan dan waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat publik terhadap sistem pemilu proporsional di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengetahui tentang apa saja peristiwa yang membuat tren minat publik mengalami peningkatan dan sejauh mana penelusuran publik terkait sistem pemilu proporsional.

2. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Peneliti melakukan pengumpulan data melalui Google Trends kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Google memberikan indeks dengan skor yang berkisar antara 0 dan 100. Nilai 0 menyiratkan bahwa tidak ada cukup data atau nilai terendah pada kueri yang digunakan, sedangkan nilai 100 menunjukkan banyaknya data atau nilai tertinggi pada kueri yang digunakan (Bantis et al., 2022). Adapun kueri yang digunakan pada penelitian ini adalah "sistem pemilu proporsional". Google Trends mudah digunakan karena Google tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menyediakan berbagai pilihan untuk perbandingan (Jun et al., 2014). Sejumlah pertimbangan metodologis harus diperhatikan dalam menggunakan Google Trends, antara lain mendokumentasikan kata kunci, jangka waktu, wilayah, kategori kueri, jenis pencarian, dan tanggal pengambilan data. Namun, Google Trends juga memiliki beberapa keterbatasan berupa hanya mencerminkan publik dengan akses internet dan menggunakan Google, validitas terbatas di wilayah dengan penetrasi internet rendah atau kebebasan berbicara, kueri sampel yang tidak diketahui, dan istilah yang tidak diketahui (Alibudbud, 2023).

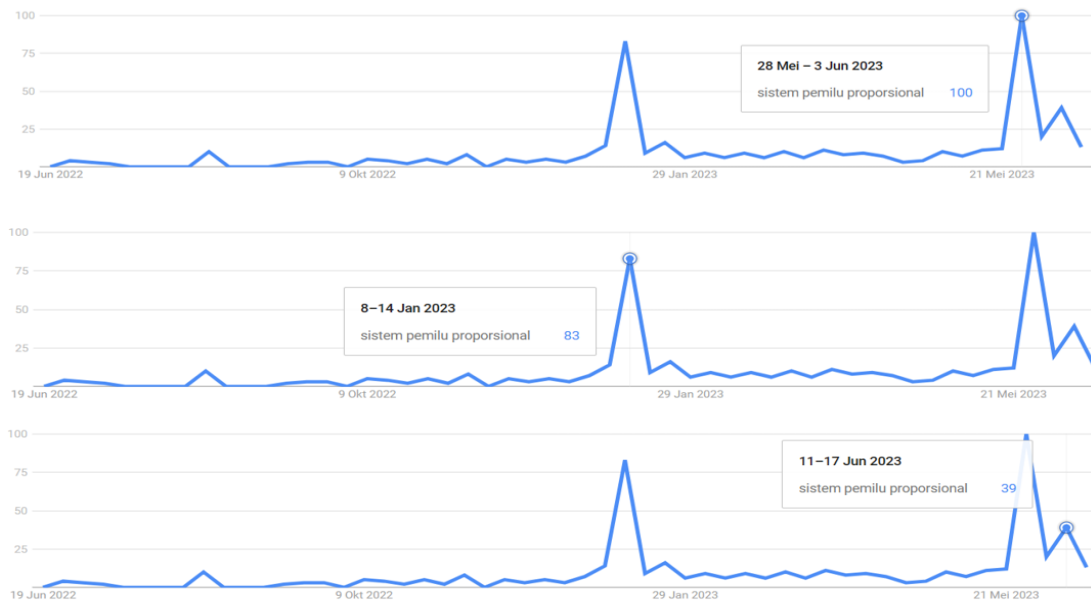
Data pada penelitian ini diperoleh dengan rentan waktu 14 Juni 2022 s.d. 21 Juni 2023. Alasan menggunakan rentan waktu ini karena Juni 2022 merupakan tahap awal pelaksanaan pemilu dan Juni 2023 adalah waktu dimana MK membacakan sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 2024 atau sekitar 1 tahun setelah tahapan awal pemilu dimulai berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2022. Pengaturan pada Google Trends disesuaikan dengan waktu dan lokasi sehingga perbandingan antarkueri lebih mudah. Beberapa pengaturan pada saat proses pengambilan data adalah sebagai berikut: lokasi diatur pada Indonesia; kategori kueri ditetapkan ke semua kategori; dan jenis pencarian diatur ke Pencarian Web.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Minat Publik tentang Sistem Pemilu Proporsional

Tren minat publik tentang sistem pemilu proporsional mengalami fluktuasi sepanjang kurang lebih satu tahun terakhir dan dinamika yang paling tinggi terjadi pada tahun 2023. Tren

minat publik tertinggi terjadi pada rentan waktu 28 Mei s.d. 3 Juni 2023 dengan nilai indeks 100, kemudian disusul rentan waktu 8 s.d 14 Januari 2023 dengan nilai indeks 83, dan terakhir pada rentan waktu 11 s.d. 17 Juni 2023 dengan nilai indeks 39.



Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Gambar 1. Tren Pencarian Informasi Tentang Sistem Pemilu Proporsional Di Indonesia Pada 14 Juni 2022 s.d. 21 Juni 2023

Berdasarkan gambar 1, tren minat publik terhadap sistem pemilu proporsional cenderung landai di tahun 2022. Dinamika tren pencarian tentang sistem pemilu proporsional mulai meningkat di awal tahun 2023, tepatnya pada 8-14 Januari 2023. Pada rentan waktu tersebut, tren minat publik memiliki nilai indeks 83. Hal itu disebabkan oleh pertemuan sejumlah tokoh politik di Hotel Dharmawangsa (Jakarta Selatan) yang membahas tentang sikap partai politik tentang penolakan sistem proporsional tertutup (Setyowati, 2023). Pernyataan sikap sejumlah parpol tersebut kemudian mendapat respons dari PDIP selaku partai yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. PDIP menghargai sikap sejumlah partai politik yang ada di DPR terkait penolakan sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilu selanjutnya (Akbar, 2023b).

Selanjutnya, dinamika tren pencarian tentang sistem pemilu proporsional meningkat pada 28 Mei - 3 Juni 2023. Pada rentan waktu tersebut, tren minat publik berada pada posisi tertinggi dengan nilai indeks 100. Dinamika itu disebabkan oleh informasi yang berasal dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana terkait adanya informasi tentang putusan MK kembali ke sistem proporsional tertutup. Informasi tersebut diklaim bersumber dari informan yang terpercaya (Ramadhan, 2023). Pernyataan ini langsung direspons oleh pihak MK. Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan bahwa MK tetap mengikuti alur penetapan putusan (Sadat & Ilham, 2023).

Pernyataan Denny Indrayana juga mendapat respons dari sejumlah kalangan, mulai dari partai politik penolak sistem pemilu proporsional tertutup, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menteri, hingga mantan presiden RI. Partai Nasdem melalui Ketua DPP Taufik Basari mengatakan bahwa jika informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana adalah informasi yang benar, maka hal itu akan berimplikasi pada hak rakyat berkaitan dengan siapa calon anggota DPR yang akan dipilih (Merdeka, 2023). Partai lain yang merespons pernyataan Denny Indrayana adalah PAN dan PKB. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa apabila MK mengesahkan sistem pemilu tertutup atau coblos partai politik maka tidak cocok untuk perkembangan demokrasi di Indonesia (Tranggana, 2023). Di sisi lain, menurut Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, PKB menghormati apapun keputusan MK karena hal itu bersifat final dan mengikat.

Selain pihak parpol, pemerintah juga merespons pernyataan Denny Indrayana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) mestinya mengusut tuntas informasi dari Denny Indrayana karena hal itu dapat dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara (Jawapos, 2023). Di sisi lain, LSM Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya dengan alasan membocorkan rahasia negara dan telah membuat resah para bacaleg di seluruh Indonesia (Awaludin, 2023). Pihak lain yang ikut merespons adalah mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY beranggapan bahwa peralihan sistem pemilu yang terjadi saat proses pemilu sedang berlangsung, maka akan menjadi rumor yang heboh dalam sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia (Kompas, 2023).

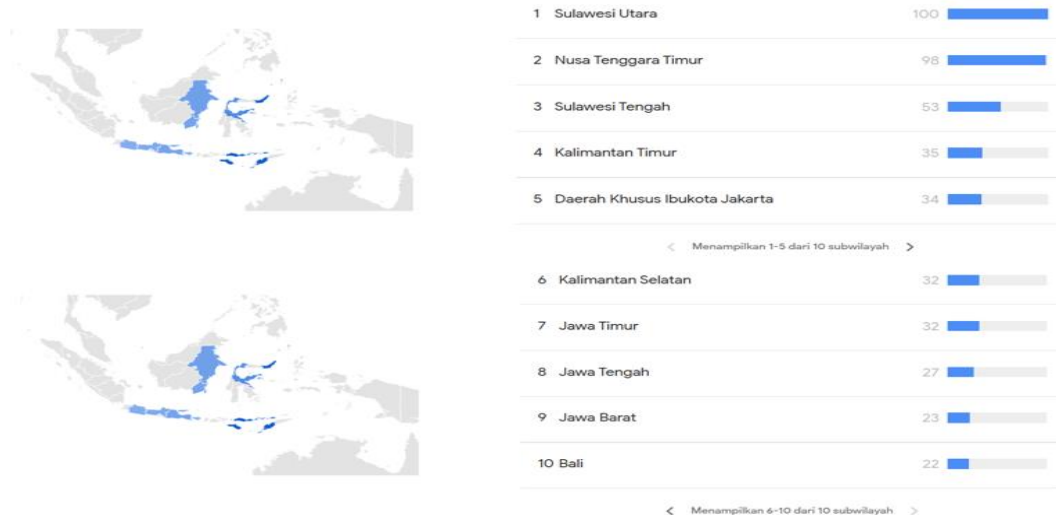
Terakhir, dinamika tren pencarian tentang sistem pemilu proporsional mulai meningkat pada 11-17 Juni 2023. Dinamika ini dipicu oleh putusan MK tentang penolakan gugatan soal sistem pelaksanaan pemilu 2024. Dengan adanya penolakan terhadap permohonan tersebut, maka pemilu anggota legislatif tahun 2024 tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka (Argawati, 2023). Hasil putusan MK itu kemudian mendapat respons dari partai politik. Bagi parpol yang mendukung sistem proporsional tertutup seperti PDIP, langkah yang diambil pascaputusan tersebut yaitu melakukan pengkajian kembali terkait sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu 2024 (Akbar, 2023a). Sedangkan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup diantaranya PKS dan PKB. Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi menghargai putusan MK menolak uji materi undang-undang sistem pemilu (Humas Fraksi PKS, 2023). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengapresiasi putusan MK terkait sistem pemilu terbuka sesuai dengan ketentuan yang sejauh ini telah digunakan (Fauzi, 2023).

Respons juga diberikan oleh pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, DPR siap melaksanakan putusan MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka. DPR meminta seluruh pihak untuk taat pada konstitusi dengan menerima putusan MK tersebut (Rizky, 2023). Selain itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

menjelaskan bahwa putusan MK menunjukkan ketaatasaan MK dengan putusannya sendiri sejak tahun 2008 lalu, yang memfokuskan sistem pemilu beralih pada sistem proporsional terbuka (MPR RI, 2023). Di sisi lain, KPU juga memberikan respons berupa rencana merancang aturan teknis penyelenggaraan pemilu berdasarkan sistem proporsional daftar terbuka (Humas KPU, 2023).

Berdasarkan ketiga momentum diatas, hal ini menunjukkan bahwa minat publik dalam mencari tahu tentang sistem pemilu proporsional didasari oleh peristiwa-peristiwa tertentu, mulai dari pernyataan sikap 8 partai politik menolak sistem proporsional tertutup, pernyataan Deni Indrayana, hingga putusan MK tentang penolakan gugatan soal sistem pelaksanaan pemilu 2024. Temuan ini sejalan dengan penelitian Martins-Filho dan timnya (2023) yang menyatakan bahwa ketertarikan untuk mencari topik tertentu di Internet dapat didorong oleh berita atau peristiwa lainnya. Dari ketiga momentum diatas, hasil analisis menunjukkan bahwa pernyataan mantan Wamenkumham merupakan pemicu tingginya minat publik dalam mencari tahu tentang sistem pemilu proporsional.

Penelitian ini mengidentifikasi wilayah dengan penelusuran sistem pemilu proporsional paling populer untuk rentan waktu 14 Juni 2022 s.d. 21 Juni 2023. Wilayah dengan minat penelusuran tertinggi hingga terendah secara berurutan, yaitu Sulawesi Utara dengan nilai indeks 100, Nusa Tenggara Timur dengan nilai indeks 98, Sulawesi Tengah dengan nilai indeks 53, Kalimantan Timur dengan nilai indeks 35, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai indeks 34, Kalimantan Selatan dengan nilai indeks 32, Jawa Timur dengan nilai indeks 32, Jawa Tengah dengan nilai indeks 27, Jawa Barat dengan nilai indeks 23, dan yang paling rendah adalah Bali dengan nilai indeks 22.



Sumber: Hasil Penelitian (2023)

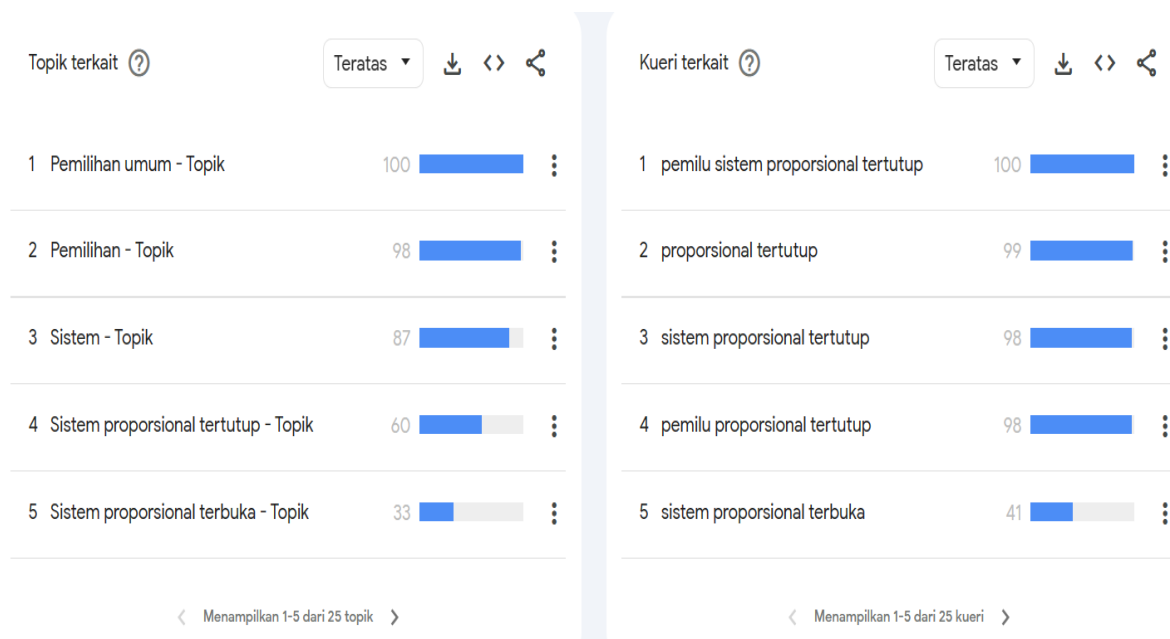
Gambar 2. Frekuensi Pencarian Terkait Sistem Pemilu Proporsional Di Indonesia Berdasarkan Wilayah

Gambar 2 menunjukkan sebaran pencarian kata kunci “Sistem Pemilu Proporsional” berdasarkan provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, publik di Pulau Sulawesi paling banyak

mencari topik tentang sistem pemilu proporsional. Jika dilihat dari masing-masing provinsi, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang paling banyak mencari informasi terkait sistem pemilu proporsional. Sementara itu, publik di Bali merupakan provinsi yang paling sedikit mencari informasi terkait sistem pemilu proporsional dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

3.2. Topik dan Kueri Yang Berkaitan

Google Trends memiliki fitur lain seperti topik terkait (*related topics*) dan kueri terkait (*related queries*). Masing-masing fitur itu dapat diurutkan berdasarkan dua metrik. Pertama, Teratas (*top*) adalah topik atau kueri penelusuran yang paling populer atau kueri penelusuran yang paling populer. Penilaian dilakukan menggunakan skala relatif dengan nilai 100 berarti topik yang paling sering ditelusuri dan nilai 50 berarti topik dengan frekuensi penelusuran separuh dari penelusuran terpopuler, dan seterusnya. Kedua, topik-topik terkait atau kueri yang mencatatkan peningkatan terbesar dalam hal frekuensi penelusuran sejak jangka waktu terakhir. Hasil yang diberi keterangan "Pesat" mengalami peningkatan yang luar biasa, kemungkinan karena topik ini baru dan (jika ada) hanya sedikit yang menelusurinya. Berdasarkan kueri "sistem pemilu proporsional, maka topik dan kueri yang terkait dapat dilihat pada gambar 4.



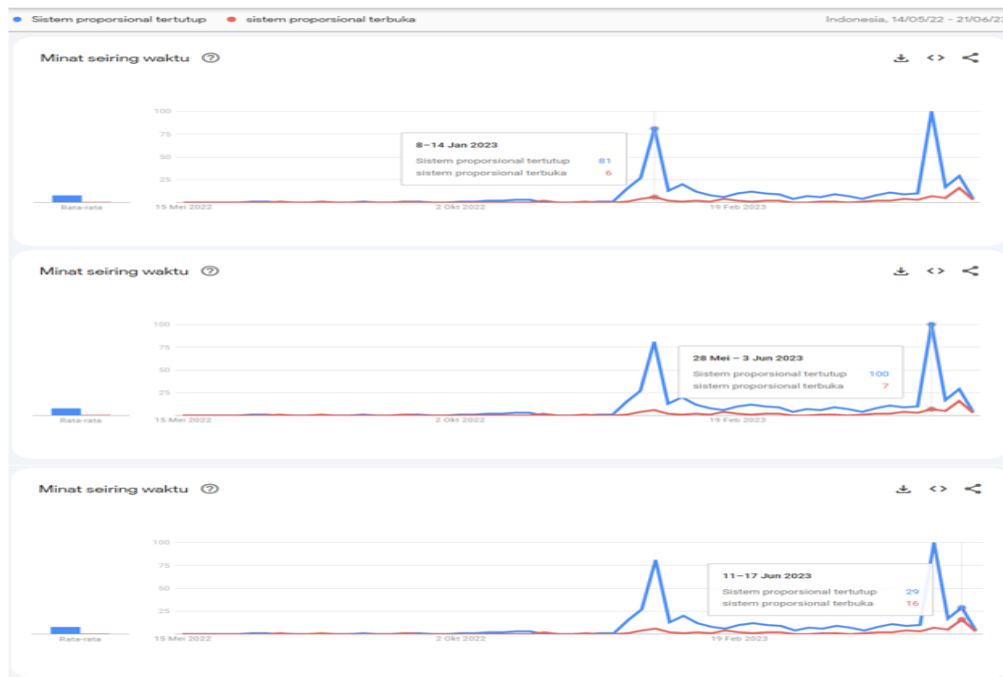
Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Gambar 3. Topik dan Kueri Berdasarkan Kueri "sistem pemilu proporsional"

Berdasarkan fitur topik teratas dan kueri teratas, terlihat bahwa tren minat publik mencari lebih dalam atau informasi yang lebih spesifik tentang sistem pemilu proporsional, yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa penelusuran publik terkait sistem pemilu proporsional tidak sampai disitu saja, minat publik untuk mencari tahu lebih jauh tentang sistem pemilu proporsional sampai pada jenis-jenis sistem pemilu proporsional.

3.3. Dinamika Minat Publik tentang Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka

Pada subbab ini, penulis membandingkan minat publik tentang sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui tentang sistem mana yang paling diminati publik dalam melakukan penelusuran di internet. Kueri yang digunakan adalah “sistem proporsional tertutup” dan “sistem proporsional terbuka”.

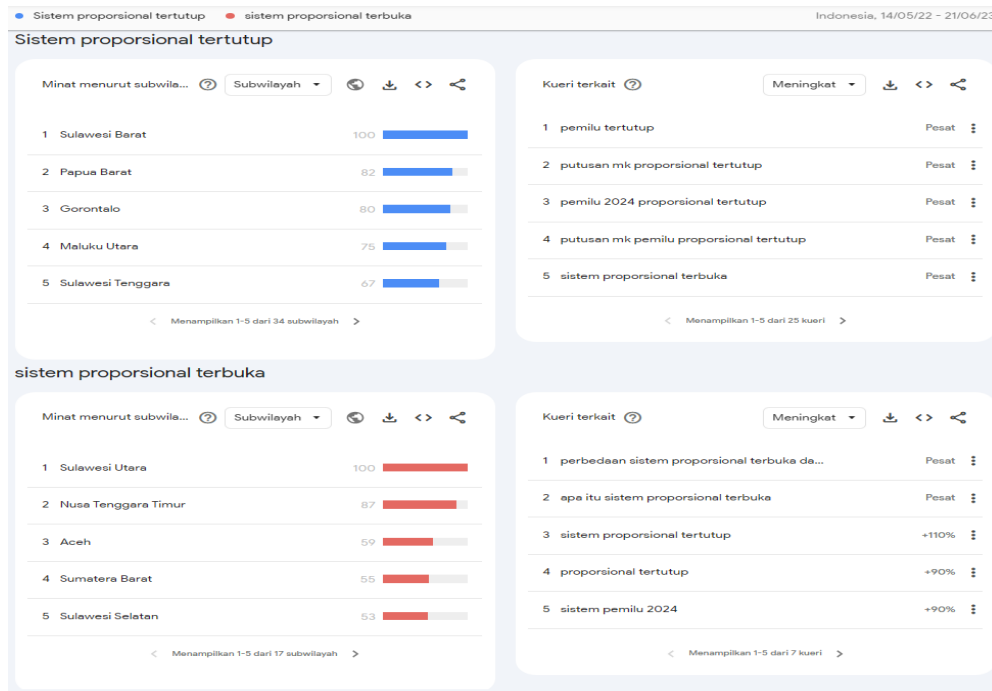


Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Gambar 4. Perbandingan Tren Minat Publik Antara Sistem Proporsional Tertutup Dengan Sistem Proporsional Terbuka

Gambar diatas menunjukkan bahwa tren minat publik tentang sistem proporsional tertutup lebih tinggi daripada tren minat publik tentang sistem proporsional terbuka. Dinamika minat publik pada kedua kueri tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan kueri “sistem pemilu proporsional”, yakni pada rentan waktu 28 Mei s.d. 3 Juni 2023 dengan perbandingan nilai indeks 100:7, kemudian disusul rentan waktu 8 s.d 14 Januari 2023 dengan perbandingan nilai indeks 81:6, dan terakhir pada rentan waktu 11 s.d. 17 Juni 2023 dengan perbandingan nilai indeks 29:16. Penggunaan kedua kueri diatas menunjukkan bahwa tiga peristiwa pemicu minat publik mencari tahu tentang sistem pemilu proporsional, terbukti juga memicu minat publik untuk mencari tahu tentang sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional tertutup. Informasi terkait sistem proporsional tertutup mendapat perhatian lebih oleh publik karena dari ketiga peristiwa yang ada, dua diantaranya lebih fokus pada sistem pemilu proporsional tertutup, yakni sikap sejumlah parpol menolak pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 dan pernyataan Denny Indrayana terkait putusan MK tentang sistem proporsional tertutup. Peneliti mengasumsikan bahwa banyaknya pencarian tentang sistem proporsional tertutup dimungkinkan karena selama ini sistem pemilu di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sehingga

pengetahuan dan pengalaman publik tentang sistem proporsional terbuka lebih banyak jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Dengan demikian, minat publik lebih banyak mencari tahu tentang sistem proporsional tertutup.



Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Gambar 5. Perbandingan Tren Minat Publik Terkait Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka Berdasarkan Subwilayah dan Kueri

Minat publik dalam mencari informasi tentang sistem proporsional tertutup didominasi oleh publik yang berasal dari Kawasan Indonesia Timur (KIT) dengan nilai paling tinggi berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, kemudian disusul Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk sistem proporsional terbuka, hampir sama dengan minat publik sistem proporsional tertutup yang didominasi oleh publik yang berasal dari KIT, bedanya hanya ada pada Provinsi Aceh yang berada Kawasan Indonesia Barat. Secara keseluruhan, Pulau Sulawesi mendominasi pencarian tentang sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Berdasarkan gambar 6, temuan menarik terdapat pada penelusuran mengenai perbandingan antara sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa minat publik tidak hanya mencari tahu kedua sistem tersebut secara parsial, tetapi juga mencari tahu langsung perbandingan diantara kedua sistem tersebut.

4. Kesimpulan

Minat publik terhadap sistem pemilu proporsional berkaitan dengan insiden atau peristiwa terkait sistem tersebut. Peristiwa diantaranya pernyataan sikap 8 parpol tentang penolakan pemilu proporsional tertutup, pernyataan Denny Indrayana terkait putusan MK tentang sistem proporsional tertutup, dan putusan MK tentang pemilu 2024 tetap menggunakan sistem

proporsional terbuka. Sejumlah pihak seperti LSM, Menteri, DPR, MPR, ormas, hingga mantan Presiden RI merespons peristiwa itu sehingga informasi terkait peristiwa-peristiwa tersebut terus berkembang dan disajikan dalam bentuk berita di internet. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketertarikan untuk mencari topik tertentu di internet dapat didorong oleh berita atau peristiwa lainnya (Martins-Filho et al., 2022). Temuan menarik dari penelitian ini adalah minat publik dalam menelusuri informasi terkait sistem pemilu proporsional telah berkembang ke pencarian informasi yang lebih spesifik, seperti mulai dari sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, hingga perbedaan antara sistem proporsional tertutup dengan sistem proporsional terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data pada Google Trends dapat dimanfaatkan sebagai basis untuk memahami minat publik terhadap sebuah kasus atau topik yang sedang berlangsung sehingga dapat terlihat reaksi publik terhadap sebuah kasus atau topik dengan mengamati tren minat pencarian publik terkait topik tersebut. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk memahami opini publik mengenai sistem politik melalui penggunaan Google Trends. Selain itu, hasil ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengantisipasi adanya polemik sistem pemilu pada penyelenggaraan pemilu sehingga diharapkan tidak ada lagi polemik tentang sistem pemilu. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan tren minat pencarian tentang sistem pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Akbar, N. A. (2023a). PDIP akan Lakukan Kajian Penerapan Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rwblz2409/pdip-akan-lakukan-kajian-penerapan-sistem-proporsional-terbuka-di-pemilu-2024>
- Akbar, N. A. (2023b). PDIP Hormati Sikap 8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/ro5vw3451/pdip-hormati-sikap-8-parpol-tolak-proporsional-tertutup>
- Alibudbud, R. (2023). Google Trends for health research: Its advantages, application, methodological considerations, and limitations in psychiatric and mental health infodemiology. *Frontiers in Big Data*, 6. <https://doi.org/10.3389/fdata.2023.1132764>
- Argawati, U. (2023). Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka. *Mkri*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260>
- Awaludin. (2023). Dinilai Bocorkan Rahasia Negara, Denny Indrayana Dilaporkan ke Polda Metro. *Okezone*. <https://megapolitan.okezone.com/read/2023/05/29/338/2822051/dinilai-bocorkan-rahasia-negara-denny-indrayana-dilaporkan-ke-polda-metro>
- Bantis, E., Clements, M. P., & Urquhart, A. (2022). Forecasting GDP growth rates in the United States and Brazil using Google Trends. *International Journal of Forecasting*, xxx. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.10.003>
- Cebrián, E., & Domenech, J. (2023). Is Google Trends a quality data source? *Applied Economics Letters*, 30(6), 811–815. <https://doi.org/10.1080/13504851.2021.2023088>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. Sage Publications.
- Fauzi. (2023). PKB apresiasi putusan MK terkait sistem pemilu. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/3589896/pkb-apresiasi-putusan-mk-terkait-sistem-pemilu>
- Fernardo, E. (2022). Mediatisasi Politik dan Perilaku Pemilih: Penggunaan Google Trend Sebagai Metode Alternatif Memprediksi Kemenangan Kandidat. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.2454>
- Harkan, A. A., & Eriyanto. (2021). Predicting the Results of the 2019 Indonesian Presidential Election with Google Trends. *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, 558(Aprish 2019), 1–9. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.001>
- Humas Fraksi PKS. (2023). *Sekjen PKS Apresiasi Putusan MK yang Tetap Berlakukannya Pemilu Proporsional Terbuka*. Fraksi PKS. <https://fraksi.pks.id/2023/06/15/sekjen-pks-apresiasi-putusan-mk-yang-tetap-berlakukannya-pemilu-proporsional-terbuka/>
- Humas KPU. (2023). *Tahapan Pemilu Tetap Mengacu Proporsional Terbuka*. KPU. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11660/tahapan-pemilu-tetap-mengacu-proporsional-terbuka>
- Jawapos. (2023). Bocorkan Rahasia Negara, Mahfud MD Minta Polisi Periksa Denny Indrayana. *RiauPos.Jawapos*. <https://riaupos.jawapos.com/politik/29/05/2023/302390/bocorkan-rahasia-negara-mahfud-md-minta-polisi-periksa-denny-indrayana.html>
- Jun, S. P., Park, D. H., & Yeom, J. (2014). The possibility of using search traffic information to explore consumer product attitudes and forecast consumer preference. *Technological Forecasting and Social Change*, 86, 237–253. <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.10.021>
- Jun, S. P., Yoo, H. S., & Choi, S. (2018). Ten years of research change using Google Trends: From the perspective of big data utilizations and applications. *Technological Forecasting and Social Change*, 130(November 2017), 69–87. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.009>
- Kompas. (2023). Ada Isu MK Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup, SBY: Ingat, Bisa “Chaos” Politik. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/29/05110031/ada-isu-mk-kembalikan-sistem-proporsional-tertutup-sby--ingat-bisa-chaos>
- Madsen, D. Ø., Silva, E. S., Sohail, S. S., & Hamdard, J. (2023). *5 years of research on Google Trends: A bibliometric review and future research directions*.
- Martins-Filho, P. R., de Souza Araújo, A. A., & Quintans-Júnior, L. J. (2022). Global online public interest in monkeypox compared with COVID-19: Google trends in 2022. *Journal of Travel Medicine*, 29(8), 1–3. <https://doi.org/10.1093/jtm/taac104>
- Merdeka. (2023). NasDem: Jika Sistem Pemilu jadi Proporsional Tertutup, Hak Rakyat

- Terenggut. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/politik/nasdem-jika-sistem-pemilu-jadi-proporsional-tertutup-hak-rakyat-terenggut.html>
- MPR RI. (2023). *Apresiasi Putusan MK Pemilu Tetap Dengan Sistem Terbuka, HNW: Penting MK Terus Konsisten Menjaga Konstitusi untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi*. MPR. <https://www.mpr.go.id/berita/Apresiasi-Putusan-MK-Pemilu-Tetap-Dengan-Sistem-Terbuka,-HNW:-Penting-MK-Terus-Konsisten-Menjaga-Konstitusi-untuk-Peningkatan-Kualitas-Demokrasi>
- Polykalas, S. E., Prezerakos, G. N., & Konidaris, A. (2013). An algorithm based on Google Trends' data for future prediction. Case study: German elections. *IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, IEEE ISSPIT 2013*, 69–73.
- Prado-Román, C., Gómez-Martínez, R., & Orden-Cruz, C. (2021). Google Trends as a Predictor of Presidential Elections: The United States Versus Canada. *American Behavioral Scientist*, 65(4), 666–680. <https://doi.org/10.1177/0002764220975067>
- Ramadhan, Z. M. (2023). Bocorkan Putusan MK, Denny Indrayana: Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rvcxxt330/bocorkan-putusan-mk-denny-indrayana-pemilu-kembali-ke-proporsional-tertutup>
- Rizky, D. (2023). Sah Proporsional Terbuka, Puan Pastikan DPR Siap Jalani Putusan MK. *Inilah*. <https://www.inilah.com/sah-proporsional-terbuka-puan-pastikan-dpr-siap-jalani-putusan-mk>
- Sadat, A., & Ilham, R. F. (2023). MK Buka Suara Soal Denny Indrayana Ngaku Dapat Bocoran Putusan Sistem Pemilu. *Viva*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1604162-mk-buka-suara-soal-denny-indrayana-ngaku-dapat-bocoran-putusan-sistem-pemilu>
- Samad, M. Y., Hilman, F., Yakub, A., Yoda, I. A., & Harahap, O. S. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Politik: Propaganda Isu Sistem Pemilu Proporsional. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 25(2), 257–270.
- Setyowati, D. (2023). Lima Poin Pertemuan 8 Partai Politik Tolak Sistem Pemilu 2024 Tertutup. *Katadata*. <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/63ba843643688/lima-poin-pertemuan-8-partai-politik-tolak-sistem-pemilu-2024-tertutup>
- Tranggana, A. U. (2023). Soal Kabar Putusan Sistem Pemilu Tertutup, Zulhas: Saya Yakin MK Bukan Perusak Demokrasi. *Rmol*. <https://politik.rmol.id/read/2023/05/29/575856/soal-kabar-putusan-sistem-pemilu-tertutup-zulhas-saya-yakin-mk-bukan-perusak-demokrasi>
- Vergara-Perucich, F. (2022). Assessing the Accuracy of Google Trends for Predicting Presidential Elections: The Case of Chile, 2006–2021. *Data*, 7(11).
- Walker, F. W. (2019). *Google Trends data as a proxy for interest in leadership* [Southeastern University]. <https://firescholars.seu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=coe>
- Yoon, C. H., Park, J., & Cheoun, M. K. (2022). Google Trends as a Predictor of Presidential Elections and Analysis of the Korean Presidential Election in 2022. *New Physics: Sae Mulli*, 72(8), 594–604. <https://doi.org/10.3938/NPSM.72.594>